

DINAMIKA POLITIK DI WAJO TAHUN 1905-1942



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana pada
Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin**

Oleh:

NIRMALASARI

Nomor Pokok: F061191054

DEPARTEMEN ILMU SEJARAH

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Sesuai dengan surat penugasan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

Nomor : 492/UN4.9/KEP/2023

Tanggal : 24 Maret 2023

Nama Mahasiswa : Nirmalasari

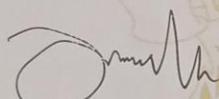
NIM : F061191054

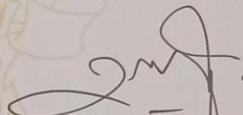
Menyetujui skripsi ini, untuk diteruskan kepada Tim Penguji di Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

Makassar, 15 September 2023

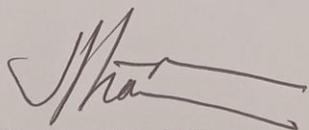
Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Amrullah Amir, S.S., M.A.
NIP. 19741016 200312 1 001


Dr. Nahdia Nur, M. Hum.
NIP. 19650321 19980 3 2001

Disetujui untuk diteruskan
kepada Panitia Ujian Skripsi
Dekan
u.b. Ketua Departemen Ilmu Sejarah


Dr. Ilham, S.S., M.Hum
NIP. 19760827 200801 1 011

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Jumat Tanggal 06 Oktober 2023, panitia ujian skripsi menerima dengan baik skripsi mahasiswa atas nama ;

Nama : Nirmalasari

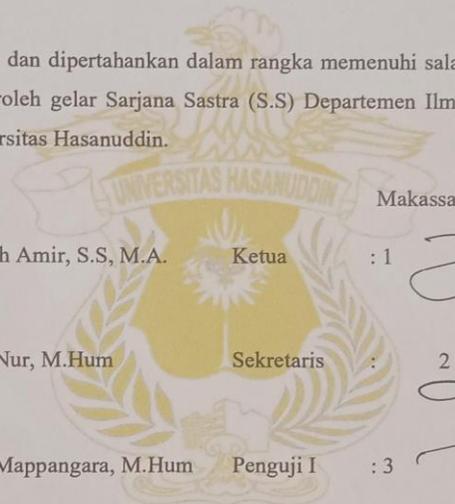
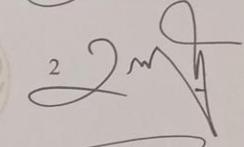
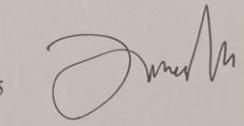
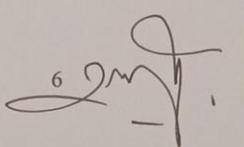
NIM : F061191054

dengan judul:

DINAMIKA POLITIK DI WAJO TAHUN 1905-1942

yang telah diajukan dan dipertahankan dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Sastra (S.S) Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

Makassar, 06 Oktober 2023

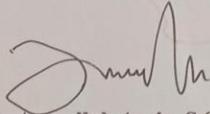
- 
1. Dr. Amrullah Amir, S.S, M.A. Ketua : 1 
 2. Dr. Nahdia Nur, M.Hum Sekretaris : 2 
 3. Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum Penguji I : 3 
 4. Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S Penguji II : 4 
 5. Dr. Amrullah Amir, S.S, M.A Pembimbing I : 5 
 6. Dr. Nahdia Nur, M.Hum Pembimbing II : 6 

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : DINAMIKA POLITIK DI WAJO TAHUN 1905-1942
Nama Lengkap : Nirmalasari
NIM : F061191054

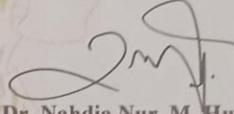
telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi pada tanggal 06 Oktober 2023 dan dinyatakan sah memenuhi syarat untuk lulus pada program sarjana di Departemen Ilmu Sejarah Universitas Hasanuddin.

Konsultan I



Dr. Amrullah Amir, S.S., M.A.
NIP. 19741016 200312 1 001

Konsultan II

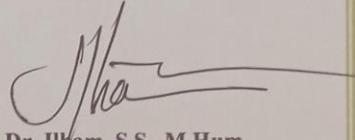


Dr. Nahdia Nur, M. Hum.
NIP. 196503211998032 001

Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin



Ketua Departemen
Ilmu Sejarah



Dr. Ilham, S.S., M.Hum
NIP. 19760827 20080 11 011

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS DAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nirmalasari

NIM : F061191054

Departemen : Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas
Hasanuddin

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

DINAMIKA POLITIK DI WAJO TAHUN 1905-1942

merupakan skripsi yang telah saya susun untuk memenuhi salah satu syarat lulus dan memperoleh gelar akademik di Universitas Hasanuddin. Seluruh sumber yang digunakan baik yang dikutip maupun dirujuk telah diperiksa dan saya nyatakan benar sesuai dengan kaidah dalam penulisan karya ilmiah yang berlaku. Semua sumber yang digunakan dan dirujuk secara langsung dalam tulisan telah dicantumkan ke dalam Daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat unsur plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku, sesuai dalam aturan yang telah ditetapkan di Universitas Hasanuddin.

Makassar, 6 Oktober 2023



Nirmalasari

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-nya, sehingga skripsi yang berjudul “ **Dinamika Politik di Wajo Tahun 1905-1942**” dapat penulis selesaikan. Salam dan shalawat tak lupa pula penulis hantarkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, sang pencerah yang membawa kita dari alam jahilyah menuju alam peradaban saat ini, dengan segala ilmu dan ajaran yang menerangi dunia.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun, dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik secara material maupun moril. Tulisan ini merupakan salah satu syarat guna mencapai gelar “**Sarjana**” di bangku perkuliahan selama 9 semester tepatnya di Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanudin.

Pada kesempatan kali ini penulis wajib mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi baik secara material dan morial. Terkhusus kepada **Dr. Amrullah Amir, S.S, M.A.**, selaku pembimbing I dan **Dr, Nahdia Nur, M. Hum** selaku

pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis.

Serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya tujukan kepada:

1. Ibunda Hasmianti, pintu surgaku. Beliau sangat berperan penting bagi penulis dalam menyelesaikan program studinya. Semangat, kerja keras, motivasi, serta doanya yang tak pernah pupus yang selalu beliau berikan menjadi alasan kuat penulis, mampu bertahan dan sampai di titik ini.
2. Ayahanda Firman, cinta pertama dan panutanku. Beliau adalah sosok pekerja keras dan tangguh. Dalam proses pengerjaan skripsi ini, adakalanya penulis merasa iri kepada beliau, penulis seringkali merasa malas, mengeluh, serta merasa dunia tidak adil. Namun, hal itu tidak sebanding dengan kerja keras beliau agar mampu menyekolahkan anak-anaknya di bangku perkuliahan.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor dan para jajarannya.
4. Bapak Prof. Akin Duli, M. A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan dan para jajarannya.
5. Dr. Ilham, S.S., M. Hum, selaku Ketua Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Sekertaris Ilmu Sejarah A. Lili Evita, S.S., M. Hum. Dr. Suriadi Mappangara, M. Hum, Dr. Muh. Bahar Akkasse, Teng., Lcp., M. Hum, Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.Ag, Dr. Bambang Sulistyoo., M. Hum, Nasihin, S.S., M.A, Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum, dan

mendiang ibu Magriet Moka Lappia, S.S., M.S. Terima kasih atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama penulis menempuh jenjang perkuliahan.

6. Drs. Dias Pradadimara, M. A., selaku pembimbing proposal penulis. Beliau yang membuka jalan penulis dalam menentukan judul, serta beliau meluangkan waktu, tenaga, serta informasi terkait penelitian penulis. Beliau merupakan salah satu role model penulis selain Kim Namjoon BTS.
7. Udji Usman Pati, S.Sos, selaku kepala Sekretariat Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Terima kasih telah banyak membantu penulis dalam pengurusan administrasi.
8. Kak Alif Nur Situdju, S.S. selaku asdos Pak Dias, terima kasih karena menjadi orang yang fast respon selama penyusunan proposal serta setia menjawab pertanyaan penulis dan atas waktunya membantu memperbaiki proposal penulis.
9. Teman-teman seangkatan Ilmu Sejarah 2019 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala proses dan kenangan yang tercipta selama perkuliahan.
10. Teman-teman VIP ku Jupe, Rise, dan Suke terima kasih telah menemani, dan menjadi support sistem penulis baik secara langsung maupun tidak. Terkhusus teman saya yang bernama Jupe sejauh ini kamu yang paling jauh, penulis

tidak menjabarkan secara detail, tetapi penulis berharap yang terbaik untukmu juga.

11. Idolaku BTS yang terdiri dari Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan Jeon Jungkook. Terima kasih telah menjadi rumah ternyaman penulis selama 4 tahun terakhir. Kalian adalah best motivator, mood booster, serta role model terbaik bagi penulis.

Makassar, 03 Oktober 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENERIMAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS DAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR ISTILAH	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian	9
1.6 Tinjauan Pustaka	9
1.7 Metode Penelitian.....	11
1.8 Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN UMUM ONDERAFDEELING WAJO HINGGA PENAKLUKAN HINDIA BELANDA	15
2.1 Letak Geografis	15
2.1.1 <i>Onderafdeeling</i> Wajo Setelah Penaklukan Hindia Belanda	17
2.2 Struktur dan Sistem Pemerintahan Tradisional <i>Onderafdeeling</i> Wajo	20
2.2.1 Struktur Pemerintahan Tradisional <i>Onderafdeeling</i> Wajo	20

2.2.2	Sistem Pemerintahan Tradisional <i>Onderafdeeling</i> Wajo	23
2.3	Sistem dan Struktur Pemerintahan <i>Onderafdeeling</i> Wajo Setelah Penaklukan Hindia Belanda	25
2.3.1	Sistem Pemerintahan <i>Onderafdeeling</i> Wajo Setelah Penataan Administrasi Pemerintahan Tahun 1907	25
2.3.2	Struktur Pemerintahan <i>Onderafdeeling</i> Wajo Setelah Penaklukan Belanda	26
2.4.	Sosial Budaya <i>Onderafdeeling</i> Wajo	29
2.4.1	Hierarki Kebangsaan	30
2.4.2	Stratifikasi Sosial.....	31
BAB III PERUBAHAN SISTEM PEMERINTAHAN OLEH KOLONIAL HINDIA BELANDA DI WAJO		34
3.1	Kebijakan Pemerintahan Hindia Belanda di <i>Afdeeling</i> Bone.....	34
3.2	Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda di <i>Onderafdeeling</i> Wajo	35
3.2.1	Masa Pemerintahan Arung Matowa La Oddang Datu Larompong 1926 sampai 1933	38
3.2.2	Kondisi Sosial	44
BAB IV DAMPAK KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH KOLONIAL HINDIA BELANDA		47
4.1	Status dan Kekuasaan Tradisional ke Birokrasi Kolonial	48
4.1.1	Hubungan Kekuasaan.....	52
4.2	Dampak Sosial Akibat Kebijakan Politik Hindia Belanda.....	54
4.2.1	Pendidikan.....	54
4.2.2	Politik Lokal	59
4.2.3	Kriminalitas	61
BAB V PENUTUP		63
5.1	Kesimpulan	63
5.2	Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA		67

LAMPIRAN.....	73
1. PETA.....	73
2. MVO WAJO.....	75
3. BIODATA PENULIS.....	87

DAFTAR ISTILAH

<i>Tanah Telleng</i>	: Tanah Koti
<i>Zelfbestuur</i>	: Pemerintahan sendiri
<i>Arung</i>	: Raja
<i>Datu</i>	: Gelar
<i>Afdeeling</i>	: Departemen
<i>Distrik</i>	: Daerah
<i>Onderafdeeling</i>	: Bagian wilayah
<i>Limpo</i>	: Wilayah
<i>Padanreng/Ranreng</i>	: Sekutu/Pendamping
<i>Civiel Gezaghebber</i>	: Petugas sipil
<i>Assistant Resident</i>	: Asisten residen
<i>Ata</i>	: Budak
<i>Arung Patappulo</i>	: 40 Raja
<i>Petta Ennenge</i>	: Enam Petinggi
<i>Wanua</i>	: Tempat/Wilayah
<i>Petor</i>	: Kontrolir (Sebutan dari bahasa bugis)
<i>Arung Mabbicara</i>	: Pembicara
<i>Korte Verklaring</i>	: Perjanjian Pendek

ABSTRAK

Nirmalasari, Nomor Pokok F061191054, dengan judul “Dinamika Politik di Wajo Tahun 1905-1942”, dibimbing oleh Dr. Amrullah Amir, S.S, M.A., dan Dr, Nahdia Nur, M. Hum.

Penelitian ini secara umum menjelaskan tentang dinamika politik di Wajo setelah penaklukan Kolonial Hindia Belanda di Sulawesi Selatan secara menyeluruh pada tahun 1905-1942. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peralihan kekuasaan tradisional ke birokrasi kolonial melalui penataan sistem administrasi pemerintahan yang bersifat militer-sipil di *Onderafdeling* Wajo. Karya ini disusun menggunakan sumber primer dan sekunder yang menggunakan metode penelitian sejarah.

Adapun hasil dari penelitian ini memberikan gambaran penguasaan Hindia Belanda di Wajo setelah penataan administrasi pemerintahan, dan peralihan kekuasaan penguasa lokal yang menandai awal kemunduran elit lokal. Sistem pemerintahan baru ini berdampak pula pada struktur pemerintahan di Wajo ketika seorang pejabat Belanda yang disebut Kontrolir ditetapkan sebagai penasehat pejabat lokal menggantikan peran dewan adat. Akibat kebijakan ini tidak hanya mempengaruhi unsur politik, melainkan beberapa lainnya seperti perekonomian, pendidikan, serta kehidupan sosial masyarakat.

Kata Kunci : Wajo, Sejarah Politik, Sistem Pemerintahan Kolonial

ABSTRACT

Nirmalasari, Principal Number F061191054, with the title "Political Dynamics in Wajo 1905-1942", supervised by Dr. Amrullah Amir, S.S, M.A., and Dr. Nahdia Nur, M. Hum.

This research generally explains the political dynamics in Wajo after the Dutch East Indies Colonial conquest in South Sulawesi as a whole in 1905-1942. This research aims to find out how the transition of traditional power to the colonial bureaucracy through the structuring of a military-civilian government administration system in Onderafdeling Wajo. This work was compiled using primary and secondary sources using historical research methods.

The results of this study provide an overview of Dutch East Indies control in Wajo after the arrangement of government administration, and the transition of power of local rulers which marked the beginning of the decline of the local elite. The new government system also affected the structure of government in Wajo when a Dutch official called Kontrolir was appointed as an advisor to local officials replacing the role of the adat council. The effects of this policy not only affected political elements, but several others such as the economy, education, and the social life of the community.

Keywords: Wajo, Political History, Colonial Government System

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jauh sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Kepulauan Nusantara, telah terdapat berbagai kekuatan politik yang kecil hingga besar dan dapat ditemukan di seluruh wilayah Kepulauan Nusantara, dengan kekuasaan tertinggi dipegang oleh penguasa yang bergelar raja, sultan, dan lain-lain. Berbagai kekuatan politik lokal ini memiliki sistem pemerintahan yang masih erat dengan stratifikasi sosial dalam masyarakatnya.¹ Selama abad ke-19 Pemerintah Hindia Belanda memperluas hegemoni di daerah jajahannya yang mencapai batas wilayah teritorial terbesar di awal abad ke-20. Dimana hampir seluruh pulau besar di nusantara menjadi daerah koloninya. Untuk meminimalisir kendala dalam pembaharuan sistem dan struktur pemerintahan lokal, pemerintah kolonial bekerja sama dengan penguasa lokal dalam menata pola pemerintahan. Hal pertama yang dilakukan adalah membatasi pengaruh penguasa lokal.

Di tahun 1824 sebagai dampak dari perjanjian London, Belanda menerapkan 2 sistem pemerintahan baru untuk wilayah Sulawesi Selatan menjadi wilayah pemerintahan sendiri (*Zelfbeestur*) dan wilayah pemerintahan langsung (*Gouvernement Landen*), yang mengatur baik dari aspek administratif maupun peradilan. Pemerintah kolonial memiliki dua alat untuk mengontrol dan mengatur

¹Nur Laely, Sistem Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di Onderafdeling Bonthain 1905-1942, *Tesis*, Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2018), hlm. 5.

sistem administrasi pemerintahan barunya yaitu *Nieuwe Organisatie* dan Perjanjian Bungaya yang telah diperbaharui (*Large Verklaring*).² Pengaruh pemerintahan dan kekuasaan Belanda secara bertahap menyebar sampai ke daerah-daerah terkecil seperti desa atau kampung. Selain itu, perubahan pola pemerintahan yang signifikan dimana setiap bagian pemerintahan dibagi menjadi beberapa cabang (*Onderafdeeling*) yang setiap cabang tersebut terdapat seorang Kontrolir (*Controlir*), dan setiap cabang tersebut dibagi lagi dalam beberapa wilayah pemerintahan (*Distrik*) yang diawasi oleh asisten residen.³

Kekuatan politik lokal memiliki peran penting sampai pada masuknya bangsa barat ke nusantara, namun perubahan besar yang menjadi awal kemunduran elit lokal di Sulawesi Selatan dimulai ketika dikuasainya wilayah ini secara menyeluruh pada tahun 1905-1906 oleh Pemerintah Hindia Belanda (*Europeesch Bestuur*) yang dapat dilihat dalam surat resmi van Heetzs kepada C.A. Kroesen tanggal 14 Juli 1905. Isi surat tersebut yaitu; Kroesen diperintahkan untuk memaksa seluruh penguasa lokal menandatangani pernyataan pendek (*Korte Verklaring*) dengan tujuan tunduk pada kekuasaan Belanda.⁴ Hal ini memicu penolakan atau perlawanan para penguasa lokal. Pada tahun 1916, pemerintah kolonial mulai menata administrasi pemerintahan

²Dias Pradadimara, Dibentuknya Negara Kolonial di Sulawesi Bagian Selatan di Abad ke-19. *Jurnal Lensa Budaya*, Vol. 12. No. 2, (Oktober 2017), hlm 61-62.

³Edward L. Poelinggomang, *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Kota Makassar 1906-1942*, (Yogyakarta: Ombak, 2004), hlm.42.

⁴*Ibid.*, hlm. 45.

wilayah koloni dan perubahan sistem pemerintahan ini ditandai dengan lahirnya istilah seperti *Gewest* yang selanjutnya berubah menjadi *Residentie*, *Afdeeling*, *District*, dan *Onderdisctriect* pada wilayah jajahannya sehingga menimbulkan perubahan politik maupun sosial. Pengaturan administratif ini disebutkan secara rinci dalam "*Nota Goedhart*".⁵

Untuk melancarkan aksinya, pemerintah kolonial merombak total sistem politik tradisional, dengan membagi wilayah menjadi kabupaten dan kecamatan, dimana seorang pejabat Belanda yang disebut *Controlir* ditetapkan sebagai penasihat pejabat lokal. Meski terdapat istilah pemerintahan sendiri, dengan adanya seorang Kontrolir ini penguasa lokal tidak lebih hanya menjadi boneka Belanda.⁶ Di Sulawesi Selatan pada tahun 1848 setelah pengaturan administratif, dapat dilihat adanya pengawasan kekuasaan terhadap penguasa lokal baik di daerah di bawah kekuasaan langsung, seperti di Distrik utara seperti Makassar, Bulukumba, Bantaeng, Selayar, wilayah yang tidak dikuasai secara langsung seperti Wajo, Tallo, Tanete, Pare-Pare, dan daerah sekutu seperti Gowa, Bone, Laikang, Mandar, Ajatappareng, Soppeng oleh pejabat Belanda.⁷

Wajo merupakan salah satu wilayah yang memiliki sistem pemerintahan yang unik, dimana penguasa tertinggi atau biasa disebut "Arung Matowa" dipilih

⁵Sudirman, *Dinamika Politik Lokal Dalam Social Capital*, *Jurnal Academia*, Vol.4, No.2, (1 Februari 2012), 743.

⁶Christian Pelras, *Manusia Bugis*, (Makassar: Innawa, 1996), hlm. 328.

⁷ Dias Pradadimara, *op.cit.*, hlm 63.

berdasarkan kekuatan dan pengaruhnya terhadap wilayah itu, bukan dilihat dari silsilah keturunan, yang pada umumnya diterapkan di satuan politik lokal besar seperti Kesultanan Gowa dan Kesultanan Bone.

Berbeda dengan beberapa wilayah lainnya di Sulawesi Selatan, sistem pemerintahan politik lokal di Kearungan Wajo tidak mengenal konsep *Tomanurung*, melainkan sistem kepemimpinan *Anang*, dimana Arung Matowa dipilih oleh salah satu dewan adat (*Padanreng*), terdiri dari kelompok arsiokrat yang memiliki peran dan posisi yang berbeda-beda, mereka ini disebut sebagai *Arung Patappuloe*, terdiri dari beberapa pejabat, yaitu Arung Matowa, Ranreng (Bettempola, Talotenreng dan Tuwa), Bate (*Pilla, Patola, dan Cakuridi*), 3 *Suro ri Bate* dan 30 *Arung Pabbicara*, yang bersama-sama membentuk apa yang disebut “Empat Puluh Arung”.⁸

Pada abad ke-19, Wajo dikenal sebagai sebuah satuan politik lokal kaum aristokrat, dimana Wajo terdiri dari persekutuan beberapa wilayah yang luas serta masing-masing memiliki pengaruh yang berbeda. Setiap wilayah ini dikenal sebagai *wanua* atau *akkarungeng* dan memiliki lembaga pemerintahan sendiri (*ana'wanua*). Hubungan persekutuan Wajo antara *wanua* inti dan *wanua* lainnya menjadi landasan hubungan antara Wajo dengan daerah bawahan dan *wanua* sekutunya.⁹

Terdapat 3 *limpo*/kelompok *wanua* utama yang dibagi sesuai asal usul satuan politik lokal Wajo dan keunggulan daerah masing-masing *limpo*. Pertama,

⁸ Abdurrazak Daeng Patunru, *Sedjarah Wadjo*, (Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1989), hlm.16.

⁹ Christian Pelras, *op.cit.*, hlm. 199-201.

Bettempola (dulunya Majauleng) dengan keunggulan di bidang pertanian. Kedua, Talotenreng (dulunya Sa'Bamparu) di bidang pengolahan nira, dan Tuwa (dulunya Tekkalala) unggul di bidang perikanan. Setiap anggota *wanua* diwajibkan memiliki hubungan kerjasama dengan salah satu *limpo*. Setiap *limpo* utama masing-masing dipimpin oleh *ranreng* dan setiap *limpo* memiliki *bate lompo* (Panglima Perang).¹⁰

Di Wajo pada 1905 setelah dikuasai oleh Belanda, dimana diterapkan sistem pemerintahan sendiri (*Zelfbestuur*),² secara perlahan kita dapat menganalisis bagaimana cara pemerintah kolonial bermain secara halus untuk menghapus atau melengserkan kekuatan politik penguasa lokal. Tentu saja pemerintah kolonial tidak melakukan secara sekaligus, melainkan menggunakan taktik/pola salah satunya dengan menyamarkan gelar jabatan dan memberikan pejabat tugas pemerintah yang akan dibahas secara lebih rinci di bab selanjutnya.¹¹

Di Wajo setelah penataan administrasi kolonial, dewan permusyawaratan tradisional atau *Arung Patappuloe* tidak lebih hanya sebagai jabatan fungsional yang kaku, dengan tugas khusus di bidang masing-masing, seperti hukum, kerja paksa, dan keuangan.¹² Beberapa *Arung Pabbicara* yang tersisa dihapuskan, dua dari tiga Ranreng, Talotenreng dan Tuwa, secara bertahap dinonaktifkan, dan Ranreng Bettempola yang tersisa diangkat menjadi kepala onderdistrik (*hoofd van het*

¹⁰ Abdurrazak Daeng Patunru, *Loc.Cit.*

¹¹ Nur Laely, *op.cit.*, hlm. 5.

¹² Christian Pelras, *op.cit.*, hlm. 328.

onderdistrict) Tosora (pernah menjadi ibu kota Kearungan Wajo).¹³ Pembaharuan ini dapat pula dilihat di Bone yang diterapkan kepada *Arung Pitue*.

Sebuah catatan Pengendali *Goedhart* pada November 1914 yang menunjukkan pembagian struktur administrasi dan pedesaan Wajo yang otonom pada hari-hari awal intervensi administratif, dan sebuah catatan yang menunjukkan bagaimana mereka (Belanda) muncul hari ini.¹⁴

Terdapat peristiwa menarik pada proses pemilihan Arung Matowa ke 42 yaitu La Passamula datu Lompulleng, karena pengangkatannya secara sepihak, menimbulkan banyak pro kontra dikarenakan Arung Betteng mengangkat Arung Matowa tanpa kesepakatan dari *Petta Ennengnge*. Salah satu pihak yang mendukung termasuk La Oddang (*Arung Peneki*), beliau terlibat dalam permusuhan antara Ranreng Bettempola dengan Ranreng Tuwa.¹⁵

Setelah wafatnya Arung Matowa ke 43 yaitu I Manggabarani Karaeng Mangepek pada tanggal 19 Desember 1916, terjadi kekosongan posisi Arung Matowa. Kekosongan ini terjadi selama 10 tahun, barulah *Petta Ennenge* sepakat mengangkat Andi Oddang Datu Larompong Arung Peneki menjadi Arung Matowa Wajo ke 44. Peristiwa ini disebabkan oleh sudah ada *Tuan Petoro (Controlir)* yang

¹³ Jong Be, “Bestuursmemorie landschap Wadjo”, (National Archief Nederland, 1935), hlm. 3.

¹⁴ Heringa, “Memorie van Overgave van de afdeeling Bone”, (National Archief Nederland, 1933), hlm. 53.

¹⁵ *Transliterasi Lontara Sukku'na Wajo Jilid II*, terj. Andi Ahmad Saransi, (Makassar: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sulawesi Selatan, 2018).

memiliki wewenang penuh dalam pemerintahan, sehingga *Petta Ennenge* memutuskan untuk tidak mengangkat Arung Matowa.¹⁶

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda antara tahun 1905-1942 terjadi beberapa aksi atau tindakan rakyat yang dipandang sebagai salah satu cara untuk menentang pemerintahan Belanda. Dalam artikel *Soerabaiasch Handelblad* tentang kondisi politik di Makassar yang ditulis oleh H. C. Zentgraaf (1920) menjelaskan alasan tindakan rakyat ini dikarenakan pemerintah tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya, untuk mengatasi hal ini pemerintah Belanda mengandalkan kekuatan militer dan sistem administrasi yang ketat untuk membatasi dan mengendalikan gerak-gerik kelompok Bangsawan, hingga mengutus mata-mata.¹⁷

1.2 Rumusan Masalah

Setelah melihat beberapa hal yang telah dikemukakan di atas dengan fokus penelitian pada dinamika politik di Wajo tahun 1905-1942, penulis mencoba merumuskan beberapa persoalan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1905-1942 terhadap kaum bangsawan?
2. Bagaimana cara penguasa lokal mempertahankan legalitasnya pada tahun 1905-1942?

1.3 Batasan Masalah

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Edward L. Poelinggomang, *op.cit.*, hlm. 9.

Penelitian sejarah membutuhkan pengungkapan fakta-fakta sedetail mungkin agar dapat merekonstruksi sepenuhnya peristiwa masa lalu. Oleh karena itu, sebuah penelitian membutuhkan ruang lingkup lokasi yang terbatas, jangka waktu tertentu dan judul yang jelas. Dalam tulisan ini penulis akan menggambarkan bagaimana penguasaan Pemerintah Hindia Belanda di Wajo dan cara penguasa lokal mempertahankan legitimasinya. Penelitian ini berfokus pada dinamika sistem pemerintahan politik. Penelitian Sejarah mengenal batasan temporal dan spasial untuk menjelaskan persoalan yang akan dikaji serta dalam penelitian ini memiliki suatu batasan agar cakupannya tidak terlalu luas.

Dalam penelitian ini batasan temporalnya adalah tahun 1905 sampai 1942. Alasan penulis mengambil batasan temporal tersebut karena pada tahun 1905 Sulawesi Selatan telah ditaklukkan secara menyeluruh oleh pemerintah kolonial Belanda dan penulis mengambil tahun 1942 sebagai batasan dalam penulisan ini karena Belanda resmi tidak memiliki kekuasaan di wilayah *Onderafdeling* Wajo. Adapun batasan spasialnya penulis mengangkat batasan wilayah *Kearungan* Wajo yang menjadi fokus penelitian ini.

1.4 Tujuan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh tujuan sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1905-1942 terhadap kaum bangsawan
- b. Untuk mengetahui cara penguasa lokal mempertahankan legalitimasinya pada tahun 1905-1942.

1.5 Manfaat Penelitian

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana strata satu di Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.
- b. Menambah literatur mengenai sejarah politik lokal khususnya di daerah Wajo bagi mereka yang memerlukannya.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Penelitian yang relevan

Wajo merupakan salah satu daerah yang penting di Sulawesi Selatan sebagai wilayah swapraja yang memiliki sistem pemerintahan berbeda dengan wilayah lain. Hal ini dibahas oleh Abdurrazak Daeng Patunru dalam tulisannya “*Sedjarah Wajo*” tentang struktur pemerintahan penguasa lokal dan Christian Pelras dalam tulisan yang berjudul “*Manusia Bugis*” yaitu membagi wilayah menjadi daerah (*Afdelingen*) dan (*Onderafdelingen*) di mana terdapat seorang Kontrolir yang merupakan pejabat Belanda. Pemerintahan Hindia Belanda berdasarkan peraturan penataan pemerintahan dalam UU lembaran Negara (*staatblad*) No.573 tahun 1910, setiap cabang pemerintahan dibagi lagi ke dalam beberapa wilayah administrasi pemerintahan (*Distrik*) yang dipimpin oleh penguasa lokal.

Setiap cabang ini terdapat seorang *Controlir* yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi segala pemerintahan penguasa lokal dengan menggunakan seorang mata-mata, baik terhadap daerah yang di bawah penguasaan langsung (*Gouvernement Landen*), kerajaan pinjaman (*Leenvorstendom*), ataupun sekutu (*Bondgenootschappelijke Landen*). *Controlir* (*Tuan Petoro*) ini dibantu oleh dua

orang pegawai lokal yaitu seorang jaksa dan seorang juru bicara. Dapat dikatakan bahwa Kontrolir merupakan pusat kegiatan pemerintahan dan kekuasaan. Penjelasan lebih rinci bisa dilihat dalam tulisan Dias Pradadimara "*Dibentuknya Negara Kolonial di Sulawesi Bagian Selatan di Abad ke-19*" dan tulisan Edward L. Poelinggomang "*Perubahan Politik dan Hubungan kekuasaan Makassar 1906-1942*".

Untuk mendukung penulisan karya ilmiah ini, dan sebagai perbandingan rencana penelitian penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan judul penelitian, diantaranya dalam tesis Nur Laely yang berjudul "Sistem Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di Onderafdeling Bonthain 1905-1942" dan skripsi Marwansyah yang berjudul "Wajo Dalam Transisi: Dari Kerajaan Pinjaman ke Onderafdeeling 1905-1942". Kedua tulisan ini sama-sama membahas tentang sistem pemerintahan kolonial di Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 1905-1942.

Namun, perbedaan penelitian penulis dari beberapa penelitian diatas adalah peneliti akan fokus pada bagaimana kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan menggunakan sumber yang lebih bervariasi seperti arsip, buku, artikel. Hal ini menimbulkan sebuah kebaruan informasi dengan tema yang terkait.

1.6.2 Landasan Konseptual

Politik

Dalam interaksi masyarakat dengan pemerintah untuk membuat kebijakan yang menjadi tujuan bersama terdapat sebuah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan merupakan suatu kebijakan pemerintah untuk mengatur sebuah negara.

Definisi politik menurut **Miriam Budiardjo** adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Terdapat 5 unsur-unsur politik menurut **Miriam Budiardjo yaitu negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, dan pembagian atau alokasi.**

Dinamika politik

Secara khusus penulis akan membahas tentang dinamika politik lokal yang berfokus pada satu wilayah. Perubahan politik lokal tidak lepas dari siapa yang memerintah dan bagaimana sistem pemerintahannya. Terdapat salah satu unsur politik yang terkait dengan perubahan politik yaitu kekuasaan (*power*).

Kekuasaan bersumber dari wewenang dan legitimasi, yang diperoleh dengan cara kompetisi, paksaan, atau warisan. Keberhasilan upaya seseorang untuk memengaruhi terletak pada wewenang dan legitimasi yang melekat pada dirinya. Semakin tinggi wewenang dan legitimasi yang dimiliki seseorang maka pengaruhnya juga semakin besar. Secara umum legitimasi diterapkan di dalam sistem politik di mana wewenang diterapkan ke pejabat-pejabat publik yang spesifik, dengan adanya legitimasi maka pemerintah mempunyai hak untuk membuat sebuah keputusan dan masyarakat umum memiliki kewajiban untuk mematuhi.

1.7 Metode Penelitian

Untuk menghasilkan tulisan yang baik maka dibutuhkan banyak sumber dalam suatu penelitian. Dalam tulisan ini penulis menggunakan beberapa sumber yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Untuk itu dalam penelitian sejarah

membutuhkan metode penelitian, seperti dalam buku Kuntowijoyo yang berjudul "Pengantar Ilmu Sejarah" terdapat beberapa tahap dalam melakukan penelitian sejarah.

1. Pengumpulan Sumber. Pengumpulan sumber sejarah sesuai dengan tema yang akan diteliti bisa melalui pengamatan langsung di Kantor Badan Arsip Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan. Selain melakukan pengamatan langsung pengumpulan sumber yang digunakan dengan mencari referensi berupa buku, arsip, jurnal. Sumber-sumber tersebut didapatkan dari link National Archief dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya.
2. Verifikasi atau Kritik Sumber. Kritik terhadap sumber seringkali hanya digunakan untuk mengetahui kebenaran dan keakuratan sumber primer. Kritik yang dilakukan bisa melalui dua cara yaitu, kritik eksternal bertujuan untuk mengetahui hal yang sebenarnya. Dan kritik internal Kritik ini dimaksudkan untuk melihat dan mempertimbangkan isi sumber dan dokumen sejarah yang digunakan. Disini penulis dapat mengecek apakah data dan dokumen yang diterima sudah benar- benar dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dalam batasan periode tersebut. Proses kritik sumber yang terdiri dari beberapa bahasa seperti Belanda, Inggris dan bahkan beberapa aksara Bugis Makassar yang mengharuskan penulis untuk menerjemahkan.

3. Interpretasi/Penafsiran. Tahap ini merupakan tahap menganalisis sumber-sumber yang telah didapatkan, dan dibagi ke dalam kelompok tahun atau peristiwa yang sama, sehingga memudahkan penulis untuk memasukkan data pada saat penelitian. Dari proses analisis tersebut kemudian diperoleh fakta-fakta, yang kemudian fakta-fakta yang telah diperoleh disatukan sehingga mendapat sebuah kesimpulan.
4. Penulisan Sejarah. Merupakan tahap akhir dalam penelitian sejarah. Dimana tahap ini adalah tahap peneliti menyusun hasil analisis dari data-data yang telah didapat secara sistematis. Penelitian ini berfokus pada Dinamika Politik di Wajo sehingga dalam penulisannya menyajikan sumber-sumber sejarah baik primer maupun sekunder yang membahas mengenai sistem pemerintahan di Sulawesi Selatan pada umumnya dan di Wajo pada khususnya. Dan juga penulis akan menjelaskan mengenai tokoh politik lokal yang masih memiliki peran penting dalam kurun periode tersebut. Kemudian sumber-sumber tersebut dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskriptif dan narasi sejarah.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan tulisan yang tersusun secara kronologis maka dalam penelitian yang berjudul *Dinamika Politik di Wajo Tahun 1905-1942*, penulis akan membaginya dalam 5 bab yang disusun secara sistematis seperti di bawah ini:

Bab I sebagai pendahuluan, berisi tentang alasan penulis mengambil judul penelitian yang dirangkum dalam latar belakang, Selanjutnya penulis akan

memaparkan rumusan masalah dan batasan masalahnya, kemudian tujuan dan manfaat dari penelitian ini kepada pihak lain, serta tinjauan pustaka yang sangat membantu memberi informasi kepada penulis dalam menyelesaikan tulisan ini, beserta metode penelitian yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Dan yang terakhir sistematika penulisan memuat tentang kerangka penulisan yang penulis coba jabarkan.

Bab II sebagai gambaran umum mengenai sistem pemerintahan politik lokal dan setelah *Korte Verklaring* di *Onderafdeeling* Wajo sebelum penataan administrasi kolonial tahun 1905.

Bab III akan membahas mengenai kebijakan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

Bab IV akan membahas tentang dampak kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda di *Onderafdeeling* Wajo dalam kurun periode tersebut.

Bab V merupakan penjabaran dari bab I sampai bab IV yang kemudian di tarik sebuah kesimpulan dari seluruh pembahasan. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari berbagai rumusan permasalahan yang telah di ajukan sekaligus menjadi penutup dalam penelitian ini.

BAB II

GAMBARAN UMUM ONDERAFDEELING WAJO HINGGA PENAKLUKAN HINDIA BELANDA

2.1 Letak Geografis

Onderafdeeling Wajo terletak di Teluk Bone dan meluas ke suatu daerah kurang lebih 200 pos, sebelah utara berbatasan dengan Pitumpanua yang nantinya secara topografis dimasukkan ke wilayah Wajo. Di sebelah barat, Wajo berbatasan dengan Sidenreng, Tempe dan Labulang dan lebih jauh dengan sebagian kecil dari Sungai Walannae ke Sungai Panka.¹⁸

Deskripsi umum semenanjung sudah menyatakan bahwa jalur utama di bagian Wajo, bagaimana kampung disebut yang saling berhubungan, serta disebutkan bahwa tanah di wilayah Wajo umumnya berbukit dan fakta, bahwa batas-batas sungai tidak kompatibel. Meskipun sungai Cinrana dan Walanae sering melampaui batas-batasnya, tanah ini dilindungi oleh bukit-bukit terhadap banjir secara keseluruhan. Di sebelah utara Sungai Cinrana, tanahnya juga berbukit, Rawa-rawa lebar meluas di sepanjang pantai.

Di tepi timur danau Tempe dan Sidenreng, terdapat sekitar 20 daerah berpenduduk *Tana Sitolo* (memanjang). Daerah yang termasuk wilayah di Cinrana

¹⁸ Staden ten Brink, P.B. van. *Zuid Celebes: Bijdragen tot de Krijgsgeschiedenis en Militaire Geographie van de Zuidelijke Landtong van het Eiland Celebes*. (Utrecht: Kemink & Zoon: 1884), hlm. 109.

seperti Tosora, Lagosi, Sengkang, Kampiri dan Tempe, dan terdapat sungai Bila. sungai yang berada di utara antara *Tanah-sitolo* dan Belawa di Danau Tempe dan disebut *Tasililoe*, dianggap sebagai sungai wilayah Cinrana asli.¹⁹

Wajo terbentuk pada tahun 1399, ketika usul La Tenribali (*Arung Cinnotabi* ke lima) diterima untuk mengubah nama negeri Boli menjadi Wajo. Adapun kerajaan-kerajaan yang erat kaitannya dengan lahirnya Wajo ialah Kedaduan Cina Riaja (kelak disebut Pamana), dengan raja pertamanya bernama La Sattumpugik. Kemudian lahirlah kerajaan kecil Cinnotabi dengan raja pertamanya adalah La Paukke anak dari ayah Arung Mampu dan ibu putri datu Cina. Kerajaan ini diperkirakan terbentuk pada tahun 1274.

Kerajaan Cinnotabi digantikan oleh kerajaan kecil Penrang dan kemudian Boli yang dibentuk oleh 3 bersaudara yang bernama La Matareng (Tuwa), La Tenritau (Bettempola), dan La Tenripekka (Talotenreng) yang menamakan negerinya *Lipu Tellu Kajurue ri Boli* (tiga negeri limpo yang bergabung bagaikan buah kemiri).²⁰

1. *Limpo* orang-orang yang tinggal di tanah tinggi yaitu di hutan, pekerjaannya membuat tiang rumah (Bettempola).

¹⁹*Ibid.*, hlm. 110.

²⁰Zainal Abidin, *Capita Selecta Sejarah Sulawesi Selatan*, (Makassar: Hasanuddin University Press: 1999), hlm. 166.

2. *Limpo* orang yang tinggal di pinggir danau yang pekerjaannya menangkap ikan dengan mempergunakan tuba (Tua dalam bahasa bugis) dinamai limpo Tua.
3. *Limpo* orang yang tinggal dekat pohon enau yang pekerjaannya mengambil nira dengan mempergunakan jenjang (Tenreng, dalam bahasa bugis) dinamai limpo Talotenreng.²¹

Pusat pemerintahan Wanua Tosora pada abad ke 16 dan 17 mengembangkan kekuasaannya sedemikian rupa, sehingga ia berhasil menggalang *wanua-wanua* yang lain melalui perang atau cara-cara lainnya, ke bawah kekuasaan Tosora. Pemerintahannya terdiri atas tiga *ranreng* yang memiliki Arung Matowa, yang merupakan pemerintahan pusat bagi seluruh wilayah Wajo. Kemudian pemerintahan ini dilengkapi oleh tiga pimpinan prajurit, yaitu tiga *Pabate Lompo*. Arung Gilirang menjadi Cakkuridi, Datu Pammana menjadi Pilla, Arung Sengkang menjadi Patola. Demikianlah terbentuk "Dewan Kerajaan", *Petta Enneng* "Enam Raja" dari Wajo. Mereka ini menunjuk seorang Arung Matowa, yang dalam kenyataannya sedikit sekali memiliki kekuasaan. Di bawah sistem pemerintahan ini masing-masing *wanua* cukup mandiri.²²

2.1.1 Onderafdeeling Wajo Setelah Penaklukan Hindia Belanda

²¹ *Ibid.*, hlm. 19.

²² Wolhoff, G.J. Terjemahan dan transliterasi *Memorie van Overgave*, Adviseur Wajo, (Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan. 2006), hlm, 155.

Ditinjau secara historis, *Onderafdeeling* Wajo merupakan suatu kesatuan *wanua* yang berkelompok di sekeliling pusat pemerintahan, Wanua Tosora, yang kini merupakan salah satu *wanua* yang terkecil dan kurang penting dan hanya menarik ditinjau dari segi sejarah sebagai pusat kerajaan yang lama (makam-makam tua, sisa-sisa dinding kota tua dan mesjid kerajaan lama). Pada mulanya setiap *wanua* merupakan masyarakat adat teritorial genealogis mandiri, suatu kesatuan *arung* atau *ke datu-an* dengan jabatan-jabatan secara turun temurun (melalui pemilihan), harta perhiasan kerajaan, hak-hak istimewa (*arajang*). *Wanua* besar yang sekarang, Pitumpanua, awalnya terbentuk dan 7 *wanua*, namun tidak termasuk federasi Wajo, melainkan dimasa itu berada di bawah kekuasaan Bone Baru pada masa kekuasaan Belanda. *Wanua* ini dimasukkan ke wilayah Landschap Wajo.²³

Menjelang akhir abad ke-19, Belanda mulai melakukan ekspansi untuk menaklukkan sepenuhnya negara-negara kepulauan yang belum berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda, termasuk negara-negara Sulawesi Selatan. Setelah menaklukkan Gowa dan Bone pada tahun 1905, Wajo dan Soppeng setuju dengan Belanda dan menandatangani Korte Verklaring, yaitu deklarasi singkat yang pada dasarnya mengakui diri mereka sebagai negara bawahan yang setia kepada Belanda dan berjanji untuk meninggalkan semua urusan luar negeri mereka dan patuh pada aturan dan peraturan Pemerintah Kolonial. Wajo resmi dibawah kekuasaan Belanda di tahun 1906.

²³ *Ibid.*

Pengaruh pemerintahan dan kekuasaan Belanda secara bertahap menyebar sampai ke daerah-daerah terkecil seperti desa atau kampung. Selain itu, perubahan pola pemerintahan yang signifikan dimana setiap bagian pemerintahan daerah (*Afdeling*) dibagi menjadi beberapa cabang (*Onderafdeeling*) yang setiap cabang tersebut terdapat seorang Kontrolir (*Controlir*), dan setiap cabang tersebut dibagi lagi dalam beberapa wilayah pemerintahan (Distrik) yang diawasi oleh asisten residen.²⁴

Dalam bulan Agustus 1906, sesudah penaklukan oleh Belanda, maka seorang Mayor Infranti Belanda dari Bone datang ke Wajo untuk mengadakan pertemuan dengan Arung Matowa, *Arung Ennenge* dan Raja-raja bawahan lainnya di Wajo. Atas desakan Mayor tersebut maka pertemuan itu mengambil keputusan, bahwa kontrak peperangan yang dibuat oleh Belanda harus ditaati oleh Wajo.²⁵

Hal ini dikarenakan Wajo tergabung dalam peperangan Bone melawan Belanda, maka Wajo dikenakan denda dan diwajibkan pula membayar ongkos peperangan pada Belanda. Semua senjata api di Wajo seperti: Meriam, senapan, pistol, dan mesiu harus dikumpulkan dalam tempo satu bulan dan diserahkan kepada komandan pasukan tentara Belanda, yang pada waktu itu ditempatkan di Ibukota Wajo, Sengkang. Pada tahun 1906 perbudakan (*Ata*) di Wajo dihapuskan secara resmi

²⁴Edward L. Poelinggomang, *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Kota Makassar 1906-1942*, (Yogyakarta: Ombak, 2004), hlm.42.

²⁵ St. Aminah P. Hamzah, *Biografi Pahlawan Hajjah Andi Ninong Ranreng Tua Wajo*, (Percetakan ujung Pandang: 1988), hlm. 24.

oleh Belanda, dengan pemegang kekuasaan tertinggi yaitu Petor (*Tuan Petoro*). Dan Arung Matowa saat itu adalah Ishaka Manggabarani Karaeng Mangepe.²⁶

2.2 Struktur dan Sistem Pemerintahan Tradisional Onderafdeeling Wajo

2.2.1 Struktur Pemerintahan Tradisional Onderafdeeling Wajo

Awalnya terdapat tiga kerajaan Bugis-Makassar yang berpengaruh di Sulawesi Selatan, yaitu kerajaan Gowa, Bone, dan Wajo. Sejarah awal Wajo sebagaimana ditinjau dari beberapa pembabakan, secara kronologis dibagi menjadi 4 periode pemerintahan, yang dimulai dengan zaman prasejarah, Arung Cinnotabi, Batara Wajo, dan Arung Matowa.²⁷

Onderafdeeling Wajo merupakan salah satu wilayah besar yang memiliki sistem pemerintahan berbeda dengan wilayah lain di Sulawesi Selatan. *Onderafdeeling* Wajo tidak mengenal konsep *Tomanurung* sebagai cikal bakal lahirnya strata sosial masyarakat, melainkan konsep kepemimpinan yang diciptakan oleh kelompok aristokrat yang terdiri dari penguasa-penguasa lokal yang berperan untuk membantu Arung yang dikenal sebagai dewan adat *Arung Patappuloe*.²⁸

²⁶ Christian Pelras, *Manusia Bugis*, (Makassar: Innawa, 1996), hlm. 330.

²⁷ Ali Fadilah, Inti Konfederasi Wajo: Survey Arkeologi di Tosora, Cinnotabi dan Lamasewanua, (*WALENNAE: Jurnal Arkeologi Sulawesi Selatan dan Tenggara*), hlm. 132.

²⁸ Christian Pelras, *op.cit.*, hlm. 325.

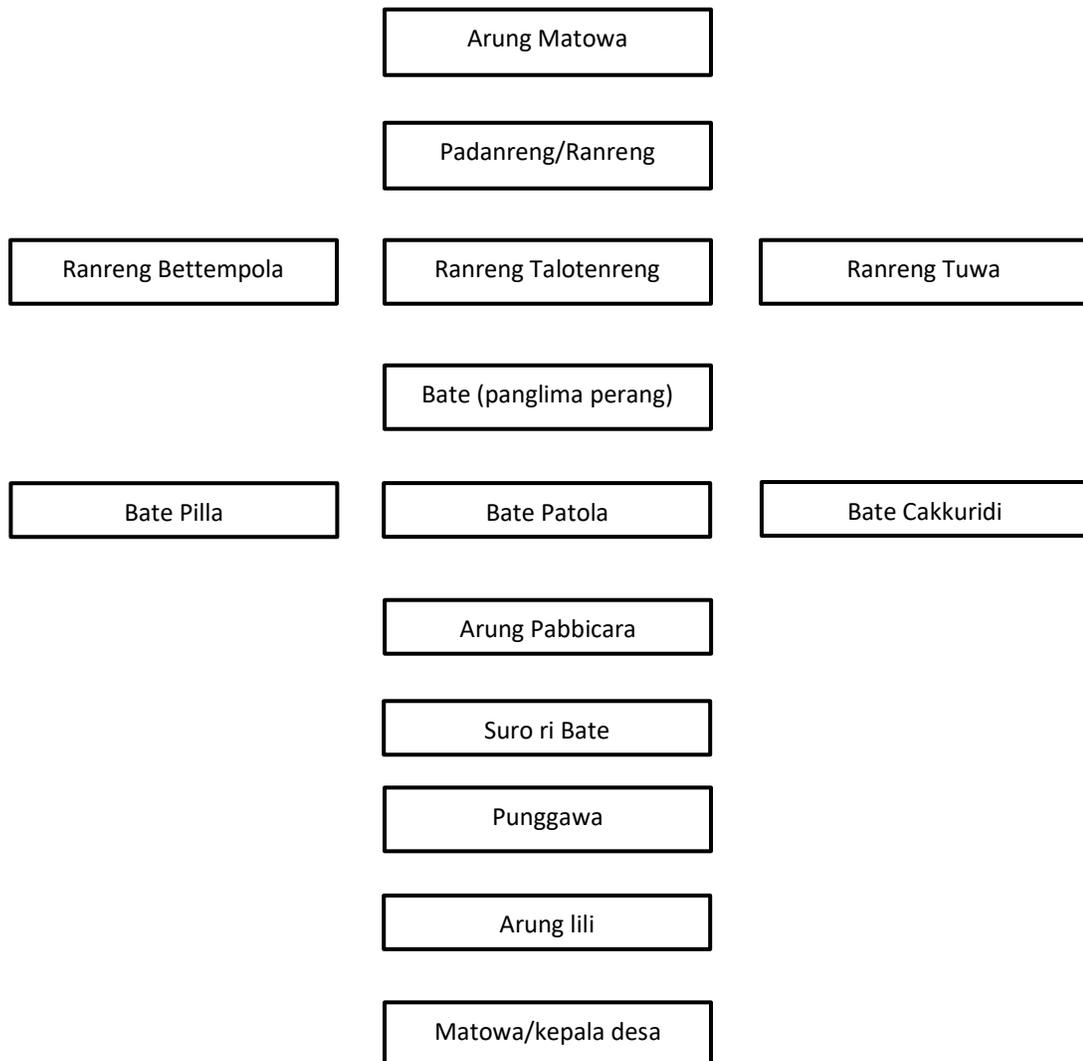
Pembagian wilayah masing-masing 3 *ranreng*, wilayah yang termasuk *Limpo* Bettempola (13 wilayah) seperti: Sekkanasu, Wewattana, Belogalung, Paria, Rumpia, Macanang, Attata, Sakkoli', Ana'banua, Lowa, Singkang, Tampangeng, dan Belawa. Wilayah yang termasuk *Limpo* Talotenreng (5 wilayah) seperti: Bola, Wage, Parigi, Lempong, Kading. Wilayah yang termasuk *Limpo* Tuwa (5 wilayah) seperti: Jampu, Canru', Ugi, Liu, Soupe.²⁹

Arung Matowa Wajo dalam pemerintahannya didampingi oleh tiga orang pembesar (*padanreng/ranreng*) yaitu Ranreng Bettempola, Talotenreng, dan Tuwa (ketiganya merupakan pemimpin di wilayah masing-masing). Disamping itu, *ranreng* ini dibantu oleh 3 *Bate Lompo* (panglima perang). Ranreng Bettempola dibantu oleh Pilla (bendera Merah), Ranreng Tuwa dibantu oleh Cakkuridi (bendera kuning), dan Ranreng Talotenreng dibantu oleh Patola (bendera aneka warna). Setelah penaklukan masing-masing *ranreng* membawahi beberapa Distrik, Bettempola 10 Distrik, Tuwa dan Talotenreng masing-masing 5 Distrik. Berbeda dengan pemilihan Arung Matowa, pemilihan *ranreng* ini bersifat turun-temurun.³⁰ Arung Matowa bersama *Petta Ennenge*, ketiga *suro ri bate*, dan 30 *Arung Pabbicara* yang berjumlah 40 orang ini merupakan badan pemerintahan yang tertinggi di Wajo.

²⁹ Zainal Abidin, *Loc.Cit.*

³⁰ St. Aminah P. Hamzah, *op.cit.*, hlm. 5.

STRUKTUR PEMERINTAHAN DEWAN ADAT ARUNG PATAPPULOE



Pada saat itu Ishak Manggabarani Karaeng Mangeppe yang menjalankan roda pemerintahan sebagai Arung Matowa (1900-1916), serta yang menjadi Ranreng Bettempola adalah La Jamero, Ranreng Talotenreng La Samallangi Karaeng Tompo-Balang, dan Ranreng Tuwa La Paleteti.

Selain yang tergabung dalam dewan adat *Arung Pattapuloe*, terdapat pejabat penting yang di gelar *Punggawa* (dulunya *Matowa*). *Punggawa* ini yang menjadi penghubung antara *Petta Ennenge* dengan raja-raja bawahan (*Arung Lili*). Di Wajo hampir semua pemimpin Arung Lili ini bergelar “*Arung*”, hanya Lili Cina yang kemudian dinamai Pamana dipimpin oleh seorang bergelar “*Datu*”. Tiap *Onderafdeeling* Lili terdapat sebuah majelis “*Hadat*” yang bertugas mendampingi *Datu*.³¹

2.2.2 Sistem Pemerintahan Tradisional *Onderafdeeling* Wajo

Ciri utama dari suatu sistem yang demokratis di suatu daerah dapat dilihat sekurangnya dari 3 aspek, yaitu bentuk pemerintahan yang pernah ada, mekanisme pemilihan pemimpinnya, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat yang dipimpinnya.³² Di Wajo pemilihan Arung Matowa tidak berdasarkan turun-temurun. Arung Matowa Wajo dipilih oleh 39 orang *Puang ri* Wajo yang didasarkan pada kemampuan pribadi dan penerimaan dari perwakilan rakyat secara terbatas.

³¹ Abdurrazak Daeng Patunru, *Sedjarah Wadjo*, (Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1989), hlm.18-19.

³² Siti Zuhro, dkk, *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kestinambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*, (Yogyakarta: Ombak, 2009), hlm 143.

Pola kepemimpinan di Wajo dikenal sebagai sistem kepemimpinan yang bersifat tradisional dan terdiri dari berbagai kelompok persatuan.³³ Salah satu ciri pola kepemimpinan ini yaitu dengan adanya perjanjian yang dibuat antara Arung Matowa dan rakyat. Dalam sistem pemerintahan *Onderafdeeling* Wajo juga didasarkan pada hukum yang dalam hal ini merupakan adat yang berlaku yang terbagi menjadi empat jenis, yaitu³⁴:

1. *Adepuraonroh* atau yang sifatnya turun-temurun
2. *Adamaraja* atau adat yang berlaku untuk dewan raja-raja
3. *Adamabiasang* atau adat kebiasaan
4. *Ada'asamaturuseng* atau adat yang disepakati bersama

Sejak awal rakyat turut serta dalam penentuan hal-hal yang penting, Arung Matowa bersama-sama dengan *Arung Mabbicara* sebuah badan perwakilan rakyat yang beranggotakan 30 orang, tidak pernah secara permanen menggeser kekuasaan *Arung Ennenge*. *Arung Ennenge* atau biasa disebut *Petta Ennenge* memiliki hak untuk memilih dan melengserkan posisi Arung Matowa.³⁵

³³ Mattulada, *Latoa : Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, (Gajah Mada University Press, 1985), hlm. 408.

³⁴ Siti Zuhro, dkk, *op.cit.*, hlm 148.

³⁵ Abdurrazak Daeng Patunru, *Sedjarah Wadjo*, (Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1989), hlm. 7.

2.3 Sistem dan Struktur Pemerintahan *Onderafdeeling* Wajo Setelah Penaklukan Hindia Belanda

2.3.1 Sistem Pemerintahan *Onderafdeeling* Wajo Setelah Penataan Administrasi Pemerintahan Tahun 1907

Di tahun 1824 sebagai dampak dari perjanjian London, Pemerintah Hindia Belanda menerapkan 2 sistem pemerintahan baru untuk wilayah Sulawesi Selatan menjadi wilayah pemerintahan sendiri (*Zelfbeestur*) dan wilayah pemerintahan langsung (*Gouvernement landen*), yang mengatur baik dari aspek administratif maupun peradilan. Pemerintah kolonial memiliki dua alat untuk mengontrol dan mengatur sistem administrasi pemerintahan barunya yaitu *Nieuwe Organisatie* dan Perjanjian Bungaya yang telah diperbaharui (*Large Veklaring*).³⁶

Setelah penaklukan tahun 1906, salah satu kebijakan pemerintah Kolonial menyederhanakan sistem dan struktur pemerintahan di *Onderafdeeling* Wajo. Di masa ini, penghapusan dewan adat *Arung Patappuloe* tidak terhindarkan, serta pengaruh *Ranreng* di wilayah-wilayahnya telah berkurang sebaliknya pengaruh *bate lombo* meningkat karena merangkap menjadi *datu* atau *arung* di *wanua-wanua* wilayah mereka.

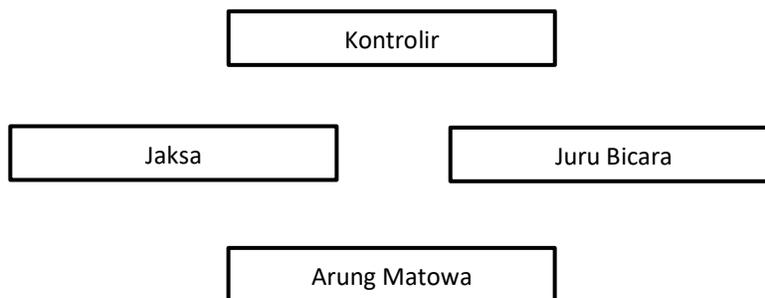
Di Wajo sering terjadi bahwa dalam satu kampung yang sama terdapat warga *ranreng* dan *bate* yang berbeda, yang tidak mempermasalahkan perintah dari kepala-

³⁶Dias Pradadimara, Dibentuknya Negara Kolonial di Sulawesi Bagian Selatan di Abad ke-19, *Jurnal Lensa Budaya*, Vol. 12. No. 2, (Makassar, Oktober 2017), hlm 61-62.

kepala suku yang lebih rendah, tetapi tetap berada di bawah kekuasaan *ranreng* atau *bate* mereka sendiri. Misalnya, jika seseorang dari Belawa (Distrik Bettempola) menetap di Wage (Distrik Talotenreng) ia akan mencoba membuat dirinya sendiri dikenakan pajak ditempat tinggalnya yang lama yaitu di Belawa. Umumnya dapat dilihat pada pemilik tanah dengan *patteseng-nya*.³⁷

Sumber penghasilan para anggota pemerintahan sendiri (*Arung Patappuloe*), kepala *wanua* dan kepala *sub-wanua* dari gaji tetap pembendaharaan tanah. Selain itu banyak yang mendapat penghasilan dari hak *arajang*. Selain itu, pendapatan kepala kampung (*Regent*) sebagian besar terdiri dari pungutan gaji dan iuran perkawinan. Penghasilan ini (kepala kampung) sebagian besar sangat kecil, sehingga sering kali sulit untuk mendapatkan orang yang ingin menduduki posisi jabatan tersebut, posisinya perlu ditingkatkan.³⁸

2.3.2 Struktur Pemerintahan *Onderafdeeling* Wajo Setelah Penaklukan Belanda



³⁷ Jong, B. de, "Bestuursmemorie landschap Wadjo", *National Archief*, (1935), hlm. 55.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 60.

Petta Ennenge

Regent/kepala kampung

Bentuk pemerintahan di Sulawesi dan daerah bawahan setelah penguasaan secara menyeluruh adalah pemerintahan militer-sipil yang ditetapkan pada surat keputusan pemerintah tanggal 9 Juli 1906. Pelaksanaan pemerintahan ini dimaksudkan untuk mencegah dan meminimalisir tanggapan penolakan dan perlawanan dari pemerintah lokal dan bangsawan di daerah itu akibat peralihan kekuasaan.³⁹

Kepala pemerintahan dipimpin oleh Gubernur. Pelaksanaan pemerintahan di wilayah pemerintahan (*Afdeling*) dipimpin oleh Asisten Residen⁴⁰, kemudian cabang pemerintahan tersebut dibagi lagi menjadi beberapa cabang (*Onderafdeeling*) yang dipimpin oleh Kontrolir. Kontrolir⁴¹ dibantu oleh beberapa pejabat lokal yang terdiri dari, jaksa, juru tulis, dan juru bicara. Setiap cabang pemerintahan dibagi lagi ke

³⁹ Edward L. Poelinggomang, *op.cit.*, hlm.96.

⁴⁰Asisten residen bertanggung jawab terhadap segala hal pada wilayah pemerintahannya dan mempertanggung jawabkan kepada residen.

⁴¹ Kontrolir merupakan pejabat Belanda yang berhubungan langsung dengan pejabat lokal yang bertugas mengawasi segala pelaksanaan pemerintah di wilayah pemerintahannya. Kontrolir merupakan pejabat terendah dari jenjang kepangkatan Pemerintah Hindia Belanda.

dalam beberapa wilayah administrasi pemerintahan yang disebut Distrik⁴². Dibawah Kontrolir terdapat regent/kepala kampung.⁴³

Pada struktur pemerintahan di *Onderafdeeling* Wajo terdapat dewan adat (*Arung Pattapuloe*) yang dipimpin oleh seorang Arung Matowa⁴⁴, yang berkedudukan dibawah Kontrolir. Dewan adat ini dibekukan dan menghapus posisi *Arung Pabbicara*. Setelah penataan pemerintahan anggota utama dewan adat ini yang disebut sebagai *Petta Ennenge*⁴⁵ sebagian dihapuskan atau dinonaktifkan. Dalam catatan yang menunjukkan struktur administrasi dan pembagian lanskap Wajo yang ditulis oleh Kontrolir Goedhart berisikan bahwa, secara bertahap Ranreng Tuwa dan Talotenreng dinonaktifkan serta beberapa *Arung Pabbicara* yang tersisa dihapuskan. Ranreng Bettempola diangkat menjadi kepala onderdistrik (*hoofd van het onderdistrict*) di Tosora (bekas ibukota Wajo).⁴⁶

Penataan administrasi pemerintahan jelas menampakkan pemisahan antara pelaksana Pemerintahan Belanda dan pemerintahan pejabat lokal. Pemerintah Hindia

⁴² Di wilayah Distrik ini berfungsi seorang pejabat lokal.

⁴³ Regent/kepala kampung bertugas untuk melaporkan segala hal yang terjadi kepada Kontrolir di wilayah pemerintahannya. Pemilihan kepala kampung ini berbeda-beda di setiap wilayah.

⁴⁴ Arung Matowa merupakan pemimpin dari dewan adat di Wajo

⁴⁵ *Petta Ennenge* terdiri dari tiga *ranreng* yaitu Bettempola, Talotenreng, Tuwa dan tiga *pabate lombo* yaitu Pilla, Patola, dan Cakkuridi.

⁴⁶ Jong, B. de, *op.cit.*, hlm. 55.

Belanda mempertahankan bentuk wilayah *Wanua*, memperbaiki dan menjadikan satu wilayah administrasi pemerintahan yang disebut Distrik.

2.4. Sosial Budaya *Onderafdeeling* Wajo

Dibeberapa *wanua* masih ada seorang *arung*, pada yang lain jabatan ini tidak diisi lagi, dan pemerintahannya dijalankan oleh seorang *sullewatang* (Pammana, Gilirang dan beberapa yang lain) atau oleh seorang *punggawa* (Tosora) atau seorang *karaeng* (Sengkang). Ini sesuatu yang sangat praktis, karena seorang *Arung* seharusnya adalah anggota keluarga bangsawan yang terpandang di *wanua* bersangkutan. Pada sistem ke *arung-an* ini juga terkait hak-hak atas lambang-lambang dan harta *kerajaan*. Pendeknya, jabatan ini sangat terkait dengan adat.⁴⁷

Sebaliknya, seorang *sullewatang* tidak harus berasal dari kelompok elit pewaris kerajaan, karena itu akan lebih banyak pemilihan hingga masa sekarang hubungan kekuasaan yang ada itu sedemikian rupa. Ke tiga dinasti besar kaum bangsawan dari mana seorang *Ranreng* harus berasal adalah blok kesatuan kekuasaan feodal Wajo Urutannya adalah Ranreng Bettempola, Ranreng Tuwa dan Ranreng Tellotenreng yang masing-masing mempunyai wilayah kekuasaan tertentu. Sebaliknya seorang

⁴⁷ Wolhof, G.J. Terjemahan dan transliterasi *Memorie van Overgave, Adviseur Wajo*, (Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan. 2006), hlm, 155.

Pabatte Lompo memiliki peranan yang lebih rendah, sementara Arung Matowa hampir tidak memiliki pengaruh.⁴⁸

2.4.1 Hierarki Kebangsawanan

Pelapisan masyarakat di Wajo terbentuk dari tiga buah wilayah yang membentuk satu kesatuan bersama, yang disebut Tanah Wajo. Hal ini karena Wajo tidak mengenal konsep *Tomanurung*, dan Wajo dipimpin oleh seorang Arung Matowa yang dipilih bersama. Pelapisan masyarakat dibagi menjadi 5 lapisan, yaitu:

- *Ana'Mattola* (Anak pewaris yang dipersiapkan untuk dapat menjadi Arung (Raja) di wilayahnya, juga dapat menjadi calon Arung Matowa Wajo).

Ana'Mattola ini dibagi lagi menjadi:

- *Ana'Sangaji* (anak terbilang mulia)
- *Ana'Rajeng* (anak dihargai)
- *Ana'Cera* (anak berdarah campuran)
- *Anakarung* (Anak bangsawan)
- *Tau Deceng* (Orang-orang baik)
- *Tau Maradeka* (Warga merdeka)
- *Ata* (Sahaya)

Pada tiap negeri yang mendukung kesatuan Tanah Wajo sedari awal telah terbentuk lapisan-lapisan masyarakat, seperti *Ana'Mattola*. Untuk *jabatan Arung*

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 156.

Matowa sendiri, tidak ditentukan lebih dahulu tentang adanya putra atau putri mahkota, yang secara langsung atau dengan sendirinya diambil dari keturunan Arung Matowa.

Hanya pada lapisan masyarakat Wajo terdapat lapisan *Ana'Mattola*. Lapisan ini adalah lapisan sosial yang selalu dipersiapkan untuk menempati pucuk pimpinan kekuasaan politik, atau elit politik. Lapisan *ana'arung* adalah keturunan dari *Ana'Mattola* yang melakukan perkawinan dengan perempuan dari lapisan *Tau Maradeka*.⁴⁹ Lapisan masyarakat yang disebut *Ata* dan sejenisnya, resmi dihapuskan diseluruh Sulawesi Selatan oleh kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1906.⁵⁰

2.4.2 Stratifikasi Sosial

Terkait penerapan hukum kolonial di Sulawesi Selatan, pemerintah kolonial menerapkan sistem pajak dan kerja paksa. Penarikan pajak ini terdiri dari pajak tanah dan pajak perorangan. Sistem kerja paksa dan penarikan pajak ini diterapkan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan kecuali, golongan bangsawan (*pangeran/ana' cera'* ke atas). Untuk membedakan diri dengan bangsawan berderajat lebih rendah, kalangan bangsawan lapisan atas pun mulai menambahkan gelar (*Andi'*) di depan nama mereka. Setelah membayar pajak mereka akan diberi surat kampung yang

⁴⁹ Mattulada, *op.cit.*, hlm. 28.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 466.

sekaligus berfungsi sebagai kuitansi pembayaran, kartu tanda penduduk, dan surat keterangan domisili.⁵¹

Stratifikasi masyarakat tradisional Sulawesi Selatan erat kaitannya dengan sistem Patron-Klien. Dalam buku James Scott (1972) yang berjudul *Comparative Political Corruption* “mengatakan bahwa hubungan patron-klien merupakan suatu kasus khusus hubungan antar dua orang yang sebagian melibatkan persahabatan instrumental”. Di mana terdapat seseorang yang berkedudukan sosial ekonomi yang lebih tinggi (patron) yang mempunyai pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan atau keuntungan atau kedua-duanya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya (klien), dan untuk membalas pemberian tersebut dengan memberikan dukungan umum dan bantuan, termasuk jasa-jasa pribadi kepada patron.

Adanya hubungan patron-klien ini mengakibatkan terjadinya hubungan timbal-balik dan terdapat ketidaksamaan dalam pertukaran antara dua pasangan, yang mencerminkan perbedaan dalam kekayaan, kekuasaan, dan kedudukan. Ketimpangan ini terjadi karena patron berada dalam posisi pemberi barang dan jasa yang sangat

⁵¹ Christian Pelras, *Manusia Bugis*, (Makassar: Innawa, 1996), hlm. 329.

dibutuhkan oleh si klien, sehingga menimbulkan rasa simpati dan wajib membalas bagi kedua belah pihak.⁵²

Hubungan patron-klien dalam masyarakat Makassar dapat dilihat dalam konsep *ajjoareng* (patron) para *karaeng* atau *anakaraeng* dan *joa* (klien) disebut *ana'-ana'* atau *taunna*. Hubungan ini terbentuk dengan sifat sukarela dan dapat diputuskan setiap saat. Hubungan ini bukan gejala baru di masyarakat tradisional Sulawesi Selatan. Salah satunya dapat dilihat dalam aspek pemerintahan di wilayah *Onderafdeeling Wajo*.

Para *Arung* dan pembesar *Zelfbestuur* lainnya masih tetap mempunyai hak usaha atas tanah-tanah tegelan atau persawahan yang disebut tanah *arajang*, yang dari zaman lampau menjadi sumber penghasilan hidup mereka. Di samping itu Pemerintah Hindia Belanda yang memberikan penghasilan bulanan (*toelage*) yang ditetapkan dalam surat keputusan G.C. Hindia Belanda.⁵³

⁵² Heddy Shri Ahimsa Putra, *Minawang: Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan*, (Yogyakarta: Gadjadara University Press 1988), hlm. 2.

⁵³ Wolhof, *op.cit.*, hlm, 155.